

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data Badan Pusat Statistik menurut Provinsi diproyeksikan hingga tahun 2035 penduduk Indonesia akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang terlihat unggul jumlah penduduknya dibandingkan dengan daerah yang lain (Badan Pusat Statistik, 2017).

Kabupaten Bogor merupakan daerah yang memiliki penduduk terbanyak dari 26 Kabupaten/kota yang tersebar di provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor saat ini terbilang cukup besar, yakni mencapai 5,7 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 mencapai 2,28 persen. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 1,39 persen (TribunNewsBogor, 2018).

Sebagai daerah yang terbilang dekat dan mempunyai akses mudah ke Ibu Kota Jakarta membuat Kabupaten Bogor menjadi salah satu alternatif daerah yang diincar para pendatang baru untuk mempunyai tempat tinggal yang layak dan untuk meminimalisir pengeluaran biaya hidup. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan hunian atau tempat tinggal di Kabupaten Bogor meningkat dengan kedatangan para pendatang baru tersebut.

Per 2017, kekurangan hunian (backlog) Kabupaten Bogor mencapai 100.000 hingga 150.000. Angka ini diprediksi akan membengkak hingga 400.000 di tahun 2030 mendatang, jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tak mengeluarkan aturan baru soal perumahan. (Radar Bogor, 2018)

Peningkatan kebutuhan akan hunian di daerah Kabupaten Bogor membuat Pemerintah Daerah harus menyiasati keadaan dengan beberapa cara. Seperti halnya di Cibinong sendiri yang sudah padat direncanakan hunian secara vertikal diingat semakin jarang ditemukannya lahan kosong. Sehingga kebanyakan pengadaan hunian baru menjadi bergeser ke daerah pinggiran, hal ini menyebabkan lahan-lahan persawahan disekitaran daerah Kabupaten Bogor rentan hilang karena terjadi tarik-menarik kepentingan terjadi antara untuk memenuhi kebutuhan hunian atau mempertahankan areal sawah. Seiring dengan terjadinya peristiwa tersebut, transaksi jual beli tanah dan bangunan mengalami peningkatan dan juga akan berpengaruh pada penerimaan BPHTB Pemerintah Kabupaten yang juga ikut meningkat.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor meningkat hingga 70 persen selama periode kepemimpinan Bupati Bogor Nurhayanti. Dari hanya Rp900 miliar pada 2014, jumlahnya tahun 2018 ini ditargetkan mencapai Rp1,56 triliun. Menurut data Bappenda pada semester pertama tahun 2018, pajak daerah yang terealisasi mencapai Rp764,8 miliar atau 48,72 persen dari target hingga akhir tahun Rp1,56 triliun. Sebagian besar di antaranya berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp238,6 miliar yang terealisasi 52,44 persen dari target Rp455 miliar (Pikiran Rakyat, 2018).

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu Pajak Daerah yang dialihkan ke pemerintah Kabupaten/ Kota dari Pemerintah Pusat sejak 1 Januari 2011 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut berdampak positif bagi

Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dimana seluruh penerimaan BPHTB akan masuk ke Pemerintah Kabupaten/ Kota, sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan tentunya meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah.

Fakta dari lapangan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu Pajak Daerah yang berperan besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat memberi kontribusi besar dan ini berdampak baik untuk keberlangsungan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah dan satu tahun anggaran (Octovido, 2014).

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apabila pengalokasian dana tersebut tepat dan berjalan sesuai dengan sasaran. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan ekonomi daerah. Hal ini berarti besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Besaran Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan tolak ukur seberapa besar kemandirian

suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah selain untuk mendanai belanja rutin, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat dan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. (Mahendra Putra. dan Ulupui., 2015).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“Analisis Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bogor dan Dampaknya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dalam pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa yang dapat dirumuskan sebagai perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana dampak kontribusi tersebut terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah:

- a) Mengetahui kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah;

- b) Mengetahui dampak dari kontribusi tersebut terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Akademis

Penulis berharap penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang dampak kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan dampak dari kontribusi tersebut terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

b) Manfaat Praktisi

Penulis berharap penulisan ini dapat dijadikan suatu masukan kepada organisasi daerah tentang kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia.